



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari peran Biro Pemerintahan Umum yang berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai organisasi yang mempunyai peranan sebagai staf Gubernur Jawa Barat, berusaha agar peranannya sebagai auxiliary staff dan advisory staff, tetap dapat mempertahankan dengan kinerja yang mampu memberi kemudahan (simplikasi) serta pelayanan terbaik bagi Gubernur Jawa Barat dan stakeholders lainnya, dengan cara-cara yang efisien dan efektif.

Dalam melaksanakan perannya tersebut Biro Pemerintahan Umum merumuskan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Umum yang merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memiliki periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pemerintahan Umum berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Umum Tahun 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan demikian Rencana Kerja Biro Pemerintahan Umum Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018.



Berdasarkan Perencanaan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Biro Pemerintahan Umum Tahun 2016 berada pada tahap pengembangan untuk mendukung dalam memantapkan Pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat terutama dalam bidang Pemerintahan Umum, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat

Pembangunan Jawa Barat 2008 – 2013 telah berhasil menyiapkan kemandirian melalui : pembentukan fondasi ekonomi regional yang kuat, pembentukan masyarakat yang semakin mandiri dan siap bersaing, pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance* dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin maju berlandaskan prinsip berkelanjutan.

Selain daripada itu dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun global, yang berlangsung secara cepat, menuntut berbagai penyesuaian dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Pembangunan dan pengembangan wilayah tidak lagi bisa dijalankan dengan cara cara konvensional. Berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif sangat diperlukan, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah, sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perubahan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 – 2018 adalah

“ Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua ”



dengan Misi :

- Pertama : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Kedua : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.
- Ketiga : Meningkatkan kinerja Pemerintahan, profesionalisme Aparatur Publik
- Keempat : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.
- Kelima : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, peran Pemuda dan Olah raga serta Pengembangan Pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Dalam kaitan penerapan asas akuntabilitas telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Salah satu kinerja yang harus disusun adalah Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah. Rencana kerja memuat informasi tentang sasaran dan program yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan serta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini yaitu :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)



17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).



1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman, landasan serta arah pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan Umum.
2. Mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan pada Biro Pemerintahan Umum
3. Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumberdaya di lingkungan Biro Pemerintahan Umum.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang :

Menjelaskan pengertian tentang Renja Biro Pemerintahan Umum, proses penyusunan Renja Biro Pemerintahan Umum, keterkaitan antara Renja Biro Pemerintahan Umum dengan dokumen RKPD, Renstra Biro Pemerintahan Umum untuk tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum :



Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Biro Pemerintahan Umum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Biro Pemerintahan Umum

1.3. Maksud dan Tujuan :

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Biro Pemerintahan Umum.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Biro Pemerintahan Umum serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Umum Tahun 2016 dan Capaian Renstra Biro Pemerintahan Umum 2013-2018
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan Umum
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pemerintahan Umum Tahun 2017
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BIRO PEMERINTAHAN UMUM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Pemerintahan Umum

Penyajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Umum tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Biro Pemerintahan Umum dijelaskan sebagai berikut :

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Pengukuran kinerja Sasaran Strategik Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat meliputi pencapaian sasaran masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Biro Pemerintahan Umum Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II (Juni 2016), yaitu sebagai berikut :



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Rp(000)	Realisasi Rp(000)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Umum	Akurasi Data Kependudukan	585.000	130.957	22,39	Baik
		Prosentase rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	400.000	387.515	96,87	Baik
		Persentase fasilitasi keanggotaan DPRD prov dan kab/kota, Kepala Daerah dan Pejabat Negara di Kab/Kota yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	200.000	176.485	88,24	Baik
		Jumlah Rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban				
		Jumlah Rekomendasi Penegasan batas daerah yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	150.000	149.235	99,49	Baik
		Prosentase inventarisasi indikator rupabumi unsur buatan di kabupaten/kota	150.000	150.000	100	Baik
		Jumlah Rekomendasi penegasan dan penetapan batas desa yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	350.000	344.932	98,55	Baik
		Jumlah Rekomendasi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	668.000	666.400	99,76	Baik
		Prosentase rekomendasi tukar menukar tanah kas desa yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	550.000	527.871	94,60	Baik
			282.133	278.112	98,57	Baik
			350.000	323.014	92,28	Baik
			200.000	189.063	94,53	Baik
		Jumlah rekomendasi penataan ruang kawasan perdesaan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	200.000	200.000	100	Baik
		Prosentase Desa yang telah dibina	553.110	532.600	94,66	Baik
		Prosentase rekomendasi tukar menukar tanah kas desa yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	250.000	250.000	100	Baik



		Akurasi data kependudukan	375.000	324.156	86,44	Baik
		Prosentase penataan administrasi pencatatan sipil	300.000	290.553	96,85	Baik
		Prosentase penataan administrasi kependudukan	650.000	594.883	91,52	Baik
		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	50.000	47.600	95,20	Baik
		Jumlah Pelayanan Kantor dalam 1 Tahun	533.620	533.619	98,12	Baik

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2016, telah selaras dengan target didalam Renstra Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 –2018.

Evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran sasaran stratejik yang telah dicapai oleh Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Data Penduduk Skala Provinsi, dari target penetapan kinerja dapat terealisasi, maka capaian kinerja rata-rata 100%. Keberhasilan pencapaian program/kegiatan 100%.
2. Tersedianya Data Penyelenggaraan Kesatuan bangsa, politik, Trantib dan SDM Satlinmas di Jawa Barat, dari target penetapan kinerja dapat terealisasi, maka capaian kinerja rata-rata 100%. Keberhasilan pencapaian program/kegiatan 100%.
3. Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum bidang Pemerintahan Desa, Administrasi Pertanahan dan Tata Pemerintahan, dari target penetapan kinerja dapat terealisasi, maka capaian kinerja rata-rata 100 %. Keberhasilan pencapaian program/kegiatan 100 %.

Dari hasil evaluasi sasaran kinerja Renja Tahun 2015 selanjutnya disandingkan dengan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2016, adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.1.
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Umum
dan Pencapaian Renstra Biro Pemerintahan Umum s.d. tahun 2016**
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Biro Pemerintahan Umum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Biro Tahun 2018 (akhir Periode Renstra Biro)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 20134	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 20145			Target prgram /kegiatan Renja SKPD tahun 20156	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 20156		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				Urusan Wajib										
3.	04	38		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Akurasi data kependudukan									
3.	04	38	01	Penataan administrasi Pencatatan Sipil	Prosentase fasilitasi penataan administrasi Pencatatan Sipil	95%	69%	70%	70%	100%	75%	75%	100%	
3.	04	38	02	Pengembangan Sistem	Prosentase data kependudukan yang	94%	65%	70%	70%	100%	78%	78%	100%	



				Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM)	diolah									
3.	04	38	03	Penataan administrasi Kependudukan	Prosentase fasilitasi penataan administrasi Kependudukan	95%	69%	70%	70%	100%	75%	75%	100%	
3.	06	54		Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Prosentase tanah bersertifikat dari keseluruhan jumlah bidang tanah									
3.	06	54	04	Proses Pengadaan Tanah dan masalah/konflik Pertanahan	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah dan jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	225	23	48	48	100%	83	80	85,71%	
3.	07	55		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terfasilitasinya Anggota DPRD pada hasil Pemilu 2014									
3.	07	55	01	Pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil	Prosentase anggota wakil Parpol yang menduduki kursi DPRD hasil Pemilu	98%	89%	90%	90%	100%	92%	92%	100%	



				Pemilu 2014	2014									
3.	07	55	02	Pemilihan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya 2014	prosentase Fasilitasi AMJ Kepala Daerah	100%	88,24%	-	-	-	-	-	-	
3.	07	55	03	Penggantian Antar Waktu/Pemberhentian anggota DPRD dan Perijinan Pejabat Negara/DPRD	Prosentase fasilitasi PAW dan Pemberhentia Anggota DPRD serta perijinan pejabat negara/DPRD	95%	89%	90%	90%	100%	92%	92%	100%	
3.	07	55	04	Peran Fungsi anggota DPRD kabupaten/kot a	Prosentase fasilitasi anggota DPRD	100%	96,61%	97%	97%	100%	98%	98%	100%	
3.	07	55	05	Fasilitasi Mediasi Infrastruktur Politik di Jawa Barat	Prosentase Fasilitasi Mediasi Infrastruktur Politik	100%	96,61%	97%	97%	100%	98%	98%	100%	
3.	08	56		Program Pemeliharaan Ketertiban	Tingkat Ketertiban Umum dan Ketentraman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



				Umum dan Ketentraman Masyarakat	Masyarakat									
3.	08	56	01	Koordinasi Fasilitasi Penyelenggara an Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Jawa Barat	Prosentase fasilitasi Trantibum	100%	99,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	09	57		Program Pemantapan Otonomi Daerah	Jumlah Regulasi Penetapan Batas Daerah									
3.	09	57	01	Penegasan batas daerah	Jumlah fasilitasi penegasan batas daerah antar provinsi dan antar kab/kota di Jawa Barat	265 segmen	53	56	56	100%	59	56	94,91	
3.	09	57	02	Fasilitasi Pembakuan nama Ruoabumi di Provinsi Jawa	Jumlah fasilitasi rupabumi alami dan buatan di Jawa Barat	2 kali	98,57	100	100	100%	25	25	100%	



				Barat										
3	02	60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya									
3	02	60	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan Umum	Jumlah Pelayanan kantor dalam 1 tahun	300 hari	100%	300	300	100	300	300	100	
3	02	60	02	Rencana Aksi Multipihak-Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Tahun 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3	03	66		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan dan evaluasi setiap akhir tahun anggaran serta dokumen perencanaan									
3	03	66	01	Kegiatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	10 dokumen	95,20%	10	10	100	10	10	100	
3.	21	69		Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Tersosialisasinya PP desa									
3.	21	69	01	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa (Sosialisasi Peraturan	Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Jumlah Perundang-undangan Desa	28 kali	94,53%	6	6	100	6	6	100	



				Pemerintah Desa)										
3.	21	69	02	Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Prosentase Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa	80%	75%	76%	76%	100	77%	77%	100	
3.	21	69	03	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Tipologi Desa dan Hasil Pemekaran	Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas desa di Kabupaten/Kota	30	2	12	12	100	14	14	100	
3.	21	69	04	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan berdasarkan Tipologi Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan Ruang Desa	9	2	2	2	100	2	2	100	
3.	21	69	05	Fasilitasi Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang telah dibina	18	2	6	6	100	6	6	100	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Misi 3 Provinsi Jawa Barat pada Biro Pemerintahan Umum dilakukan dalam 8 program dan 20 kegiatan. Evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja kegiatan Biro Pemerintahan Umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

I. Urusan Wajib

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

a) Pelaksanaan Program :

- 1) Kegiatan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh **Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat** dengan **alokasi sebesar** Rp. 236.193.750 dan **realisasi anggaran sampai bulan Juli** sebesar Rp. 128.865.003 atau setara dengan 54,56%. **Output** kegiatan adalah Rapat Sosialisasi Pelayanan Prima dan. **Outcome** Tersampainya dan meningkatnya pemahaman tentang pelayanan prima bagi peserta.
- 2) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilaksanakan oleh **Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat** dengan **anggaran** sebesar Rp. 397.575.000,- dan **realisasi anggaran sampai bulan Juli** sebesar Rp. 248.508.514,- atau setara dengan 62,50%. **Output** kegiatan adalah 2 (dua) kali Rapat Koordinasi Sinkronisasi Database Kependudukan, Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Pengembangan Wawasan SIAK aparatur Provinsi dan Kab/Kota ke Provinsi Bali **Outcome** kegiatan adalah menambah wawasan aparatur pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan SIAK.



- 3) Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh **Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat** dengan alokasi **anggaran** sebesar Rp. .350.550.000,- dan **realisasi anggaran sampai bulan Juli** sebesar Rp. **157.415.000** atau setara dengan 44,90%. **Output** kegiatan adalah Workshop Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Pengadaan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat, Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan **Outcome** kegiatan adalah terselenggaranya Workshop Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Barat, terselenggaranya Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan

b) Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan **permasalahan** yaitu:

- (1) Waktu pelaksanaan Rakor Sinkronisasi Database sangat terbatas sehingga peserta hanya mendengarkan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, **solusi** yang dilakukan adalah:

- (1) Mengusulkan kepada BKD Provinsi perihal permintaan aparatur PNS.
- (2) Meningkatkan koordinasi dengan Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kelancaran jaringan.
- (3) Merekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Se Jawa Barat untuk dilakukan pengusulan Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013.
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan Biro Pengelolaan Barang Daerah untuk pengadaan sarana dan prasarana administrasi kependudukan.



(5) Melaksanakan sosialisasi yang intens kepada semua elemen masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

a) Pelaksanaan Program :

Kegiatan Proses Pengadaan, Penataan dan Masalah Pertanahan yang dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 585.000.000,-, **realisasi anggaran** sebesar Rp. 174.361.000 terserap 29,85% **Output kegiatan** ini adalah 13 tahap persiapan pengadaan tanah yang sudah selesai penetapan lokasinya oleh Gubernur, fasilitasi konflik pertanahan sedangkan **outcomenya** adalah sebagai berikut terbitnya izin penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi adanya konflik pertanahan yang diakibatkan oleh Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum terutama dalam hal pembebasan ganti rugi yang sering tidak sepadan mengenai besarnya, **Solusinya** adalah dengan adanya Konsultasi Publik yang melibatkan antara masyarakat dan Pemerintah harus sering berdialog dengan masyarakat agar dapat memahami dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau melalui putusan pengadilan.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

a) Pelaksanaan Program :

(1) Kegiatan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berakhir Masa Jabatannya Tahun 2015 dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan



alokasi anggaran sebesar Rp. 609.750.000- **realisasi anggaran** adalah sebesar Rp. 355.565.423,- (58,31%). **Output** kegiatan adalah Penetapan Keputusan Mendagri tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wabup, Walikota/Wakil Walikota **Outcome** kegiatan adalah ditetapkannya Keputusan Mendagri tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wabup, Walikota/Wakil Walikota

- (2) Kegiatan Pengisian Penjabat Bupati Daerah Hasil Pemekaran yang dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 75.330.000, **realisasi anggaran sampai triwulan II** adalah sebesar Rp. 0,- (0%). **Output** Tidak dapat dilaksanakan karena regulasi tentang penetapan DOB masih dalam pembahasan di DPR RI.
- (3) Kegiatan Fasilitasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perizinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Provinsi/kabupaten/kota yang dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 342.000.000 **realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II** adalah sebesar Rp. 190.792.500,- (55,78%). **Output** kegiatan Penetapan Keputusan Mendagri/Gubernur tentang PAW, Penetapan surat ijin Mendagri **Outcome** kegiatan adalah ditetapkannya Keputusan Mendagri/Gubernur tentang PAW, ditetapkannya surat ijin Mendagri.
- (4) Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 112.500.000,- **realisasi anggaran** adalah sebesar Rp. 67.500.000,- atau sebesar 60.00% **Output** kegiatan ini adalah 1



(satu) kali Rakor Linmas di Jawa Barat dan 1 (satu) kali rapat persiapan dan evaluasi Linmas di Jawa Barat adapun **Outcome** kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas Peran dan fungsi Linmas dalam menciptakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Jawa Barat

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- (a) Kurangnya kelengkapan berkas persyaratan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota berakibat terlambatnya proses penetapan tentang pengisian anggota DPRD kabupaten/kota oleh Gubernur;
- (b) Masih adanya konflik internal partai politik untuk mengusulkan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota yang berakibat tertunda proses pengisian anggota DPRD kabupaten/kota.
- (c) Adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh calon yang tidak puas dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD berakibat tertundanya pelantikan anggota DPRD hasil PAW.
- (d) Kurangnya kelengkapan berkas persyaratan yang diusulkan oleh Ketua DPRD Kabupaten/Kota tentang usulan pengesahan/pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berakibat terhambatnya proses penetapan dari Kemendagri;
- (e) Belum adanya peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga menghambat perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Solusi

- (a) Untuk melengkapi kekurangan berkas persyaratan, konflik internal partai politik dan terjadinya gugatan PTUN maka dilakukan koordinasi ke kabupaten/kota dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.



- (b) Mengadakan koordinasi ke Kabupaten/Kota untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dan konsultasi ke Dirjen Otda di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka proses pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (c) Melakukan mediasi berbagai masukan yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, dimana organisasi kemasyarakatan merupakan mitra sejajar pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi Jawa Barat.

4) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

a) Pelaksanaan Program :

- (1) Kegiatan Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan oleh **Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat** dengan **alokasi** sebesar Rp. 315.000.000,- **realisasi anggaran** sebesar Rp. 195.430.700,- atau setara dengan 62,04%.

Output kegiatan adalah 6 (enam) kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebanyak 50 orang, diantaranya:

1 kali Verifikasi 12 Segmen Batas Daerah se Jawa Barat sebanyak 50 orang; 1 kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Segmen Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi; 1 kali Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Segmen Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat:.

Outcome upaya penataan dan penegasan batas daerah ini bukan berarti bahwa mengkotakkan wilayah kerja administrasi pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. kerjasama antar



daerah mutlak diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari adanya konflik kepentingan.

- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan **anggaran** sebesar Rp. 540.000.000,- **realisasi anggaran** sebesar Rp. 215.646.000,- atau setara dengan 39,93 %.

Output kegiatan adalah 4 (empat) kali Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Umum **Outcome**. Tercapainya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

- (2) Kegiatan Pembakuan nama Rupabumi di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 450.000.000,- **realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II** Rp.261.329.500,- atau setara dengan 58,07 %.

Output kegiatan ini adalah Rapat persiapan pembakuan Rupabumi Unsur Buatan, Rapat Fasilitasi Rupabumi Unsur Buatan se Jawa Barat, Rapat Koordinasi pembakuan Rupabumi Unsur Buatan se Jawa Barat bertempat di BKPP I Bogor, BKPP II Purwakarta, **Outcome** Kegiatan adalah terinventarisasi rupabumi unsur Buatan di Jawa Barat pada 27 Kabupaten/Kota mencakup nama, sejarah, asal bahasa, titik koordinat dan telah terverifikasi.

b) Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan **permasalahan** yaitu: 2 (dua) segmen batas daerah belum disepakati yaitu batas antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon dan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. **Solusinya** untuk proses penyelesaian segmen batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon



dan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan tahapan penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah masih belum mencapai kesepakatan.

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Pelaksanaan Program :

1) Kegiatan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan Umum yang dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 659.520.000,- **realisasi anggaran** sebesar Rp. 380.044.550,- atau setara dengan 57,62% **Output** kegiatan ini adalah 74 (tujuh puluh empat) kali rapat memenuhi undangan, 37 (tiga puluh tujuh) kali konsultasi dan koordinasi, 6 (enam) kali rapat internal di Lingkungan Biro Pemerintahan Umum.

Outcome kegiatan adalah terpenuhinya undangan kepada Biro Pemerintahan Umum, terfasilitasinya kebutuhan operasional kinerja biro pemerintahan umum dan meningkatnya jiwa korsa dan disiplin pegawai di Lingkungan Biro Pemerintahan Umum.

2) Kegiatan Rencana Aksi Multi Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM pada **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000.000 realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 215.524.316,- atau setara dengan 39.91%.

b) Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan.



- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Pelaksanaan Program :

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan internal Biro Pemerintahan Umum yang dilaksanakan pada **Biro pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 25.875.000,- **realisasi anggaran** sebesar Rp. 23.100.000,- atau setara sebesar 46,84%

Output dari kegiatan ini adalah 1 (satu) Dokumen IKU dan PK (Perjanjian Kerja) 2016, 1 (satu) dokumen RKT 2017, 1 (satu) dokumen RENJA 2017.

Outcome kegiatan adalah Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

b) Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan.

- 7) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

a) Pelaksanaan Program :

(1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan **Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat**, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 254.508.750,- **realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II** adalah sebesar Rp. 150.000.000,- atau sebesar 58,93% **Output** kegiatan ini adalah 3 (tiga) kali rapat teknis kegiatan Trantibmas di Jawa Barat dan 1 (satu) kali Rakor Trantibmas di Jawa Barat adapun **Outcome** kegiatan adalah terhimpunnya data dan laporan keadaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat.



b) Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan **permasalahan** yakni : Belum maksimalnya sinergitas berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, **solusi** yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders di Jawa Barat , yakni dengan melakukan rapat teknis yang melibatkan semua stakeholder yang terkait secara kontinyu.

8) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Tipologi Desa dan Hasil Pemekaran yang dilaksanakan pada Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 323.190.000 **realisasi anggaran** sebesar Rp. 137.054.850 atau setara (42,40%). Output kegiatan adalah Rapat Persiapan Penataan Batas Desa, Rapat Ajudikasi Penataan Batas Desa di Kec. Indramayu.

Outcome : tersampainya maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, sesuai Pergub No. 44 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jawa Barat, yang meliputi : Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Batas Desa, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengumpulan dokumen; Penyiapan sarana; Penyiapan administrasi. Adanya kesepakatan desa dengan desa lain yang berbatasan dalam menentukan titik koordinat batas desa atau titik kartometris, dan deliniasi garis



batas dari peta citra dengan menggunakan software ArcGis, yang disepakati dengan berita acara. Terlihatnya persamaan dan deviasi/perbedaan koordinat batas desa pada lampiran berita acara antara metode ajudikasi dengan software ArcGis dan pengukuran langsung kelapangan dengan menggunakan alat ukur GPS.

- 2) Kegiatan Fasilitas Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berdasarkan Tipologi Desa yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 273.600.000 **realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II** sebesar Rp. 137.100.000 (50.10%). **Output** kegiatan adalah Survey primer dan sekunder di kecamatan Kuningan Kab. Kuningan. Rapat FGD (*Focus Group Discussion*) Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berdasarkan Tipologi Desa.

Outcome : tersusunnya data lapangan dan data instansional yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah desa. terjaringnya aspirasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif di

- 3) Kegiatan Fasilitas Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Desa (Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 390.307.500 **realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II** sebesar Rp. 243.863.799 (62,48%). **Output** kegiatan adalah Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Barat (1 kali), Sosialisasi Peraturan tentang Pemerintahan Desa di BKPP Wilayah I (1 kali), Sosialisasi Peraturan tentang Pemerintahan Desa di BKPP Wilayah II (2 kali), Sosialisasi Peraturan tentang



Pemerintahan Desa di BKPP Wilayah III (1 kali), Sosialisasi Peraturan tentang Pemerintahan Desa di BKPP Wilayah IV (2 kali) **Outcome** : adanya sinergitas kesepahaman persepsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembinaan kelembagaan pemerintahan desa di Jawa Barat dan tersosialisasikannya Peraturan tentang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di BKPP Wilayah I, II, III dan IV.

- 4) Kegiatan Penyelesaian Tanah Kas Desa yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan **alokasi anggaran** sebesar Rp. 480.420.000 **realisasi anggaran** sebesar Rp. 207.369.762 (43.16%). **Output** kegiatan adalah 4 (empat) kali Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kas Desa (TKD) di Wilayah BKPP I sampai dengan IV sebanyak 240 orang. Permohonan Ruislag (tukar menukar) tanah kas desa telah diterbitkan³ (tiga) ijin Gubernur untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang meliputi Desa Saraja Kecamatan Pabedilan dan Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan dan Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. **Outcome** kegiatan adalah terfasilitasinya ijin Gubernur untuk tukar menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
- 5) Kegiatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi **anggaran sebesar** Rp. 213.300.000, **realisasi** adalah sebesar Rp. 45.300.000 (21.24%). **Output** kegiatan adalah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi mengenai Administrasi dan Keuangan Desa ke 15 Kabupaten se-Jawa Barat dan 1 Kota Banjar yang meliputi



Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.

Outcome kegiatan adalah memudahkan aparatur pemerintahan desa/kabupaten/kota dalam menginventarisasi data tanah kas desa dan data desa secara tertib administrasi dan terbinanya sumber daya manusia perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- a) Masih kurangnya operator komputer dalam membuat proposal bantuan keuangan dan masih adanya kesalahan penyusunan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- b) Pengisian Profil Desa khususnya Data Dasar Keluarga dilakukan secara manual dikarenakan server jaringan internet kurang terjangkau.
- c) Terjadinya konflik batas desa dikarenakan tidak adanya peta desa berdasarkan titik koordinat batas desa yang merupakan salah satu syarat dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- d) Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan, permasalahan daya dukung dan daya tampung, pertumbuhan kegiatan yang tidak terkendali dan daya tampung lingkungan, timbulnya zona campuran yang tidak sesuai peruntukan, dikarenakan belum adanya suatu pedoman penataan ruang kawasan perdesaan sesuai dengan tipologi desa yang berbasis kepada masyarakat.



- e) Masih rendahnya pengetahuan dan wawasan aparat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga program penyelenggaraan pemerintahan desa di Jawa Barat terhambat.
- f) Dari 21 pemohon ruislag yang meliputi 66 desa, sisanya adalah 15 pemohon yang meliputi 46 (empat puluh enam) desa diluar kepentingan umum dan belum diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- g) Kurang lengkapnya data tanah kas desa di 18 Kab dan 1 Kota Banjar, sehingga kurang tertibnya administrasi inventarisasi tanah kas desa, tidak diketahui secara jelas asset desa, tidak dapat terpetakan (mapping) desa untuk memudahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Solusi

- (a) Diperlukannya tambahan pegawai operator komputer yang menguasai program MS.Office dan adanya pembinaan yang berkesinambungan dari Kabupaten dan Provinsi kepada Kepala Desa mengenai sistematika proposal bantuan keuangan dan administrasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.
- (b) Sistem bisa langsung dipindahkan ke Website serta Data tingkat perkembangan dan potensi desa yang di input sama 2 kali secara otomatis data pertama akan terhapus.
- (c) Melakukan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat.
- (d) Melakukan fasilitasi penataan ruang kawasan perdesaan berdasarkan tipologi desa.
- (e) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.



- (f) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- (g) Melakukan sosialisasi, fasilitasi tanah kas desa.



Tabel 2.2.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan Umum s/d Tahun 2015
Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Tahun 2014	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Catatan Analisis	
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017
1	Prosentase data kependudukan yang diolah		95%	70%	75%	82%	88%	70%	75%	82%	88%	
2	Prosesntase Akurasi Data Kependudukan		94%	70%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	85%	
3	Prosentase fasilitasi penataan administrasi Pencatatan Sipil		95%	70%	75%	80%	85%	70%	75%	80%	85%	
4	Prosentase fasilitasi penataan administrasi Kependudukan		95%	70%	75%	82%	88%	70%	75%	82%	88%	
5	Jumlah fasilitasi pengadaan		255	48	83	45	55	48	80	45	55	



	tanah dan jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan									
6	jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	255	48	83	45	55	48	80	45	55
7	Prosentase anggota wakil Parpol yang menduduki kursi DPRD hasil Pemilu 2014	98%	89%	90%	92%	95%	89%	90%	92%	95%
8	Jumlah Fasilitasi AMJ Kepala Daerah	100%	100%	-	-	-	88,24%	-	-	-
9	Prosentase fasilitasi PAW dan Pemberhentia Anggota DPRD serta perijinan pejabat negara/DPRD	95%	90%	90%	92%	95%	89%	90%	92%	95%
10	Prosentase	100%	97%	97%	98%	99%	96,61%	97%	98%	99%



	fasilitasi anggota DPRD									
11	Prosentase Fasilitasi Mediasi Infrastruktur Politik	100%	97%	97%	98%	99%	96,61%	97%	98%	99%
12	Prosentase fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden	100%	100%	-	100%	-	98,55%	-	100%	-
13	Prosentase fasilitasi Trantibum	100	100%	100%	100%	100%	98,55%	100%	100%	100%
14	Jumlah fasilitasi penegasan batas daerah antar provinsi dan antar kab/kota di Jawa Barat	265 segmen	56 segmen	59 segmen	62 segmen	65 segmen	56 segmen	59 segmen	62 segmen	65 segmen
15	Jumlah fasilitasi rupabumi alami dan buatan di Jawa Barat	10 unsur	2 unsur	2 unsur	2 unsur	2 unsur	2 unsur	2 unsur	2 unsur	2 unsur
16	Jumlah Pelayanan kantor dalam 1	300 hari	300 hari	300 hari	300 hari	300 hari	300 hari	300 hari	300 hari	300 hari



	tahun									
17	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	11 dok	10 dok	10 dok	10 dok	11 dok
18	Jumlah Fasilitasi Sosialisasi Jumlah Perundang-undangan Desa	28 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali
19	Prosentase Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa	80%	76%	77%	80%	80%	75%	75%	80%	80%
20	Jumlah Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas desa di Kabupaten/Kota	30 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	6 desa	6 desa	5 desa	5 desa
21	Jumlah Fasilitasi Penataan Ruang Desa	9 tipologi	2 tipologi	2 tipologi	2 tipologi	2 tipologi	2 tipologi	2 tipologi	2 tipologi	2 tipologi
22	Jumlah Desa yang telah dibina	18 desa	2 desa	6 desa	6 desa	6 desa	2 desa	4 desa	6 desa	6 desa



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Umum

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat tentunya memperhatikan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan melihat hasil Kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan arah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Apabila dilihat dari capaian kondisi tahun 2015 dalam pencapaian target kinerja Biro Pemerintahan Umum terdapat beberapa isu strategis berdasarkan aspek internal biro Pemerintahan Umum dan eksternal Biro Pemerintahan Umum yaitu :

a) Permasalahan internal :

1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia adalah masalah klasik namun masih menjadi masalah utama dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Pemerintahan Umum, banyaknya SDM yang mempunyai masa kerja cukup lama tidak didukung dengan kemampuan baik teknis maupun operasional hal ini belum sesuai dengan yang dibutuhkan, terutama pegawai yang berbasis IT untuk pengelolaan data kependudukan maupun data lainnya.

2. Terbatasnya sarana dan Prasarana pelayanan

Masalah klasik selanjutnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Umum, sarana prasarana yang ada harus dapat digunakan secara optimal bagi terselenggaranya program/kegiatan Biro Pemerintahan Umum.



b) Permasalahan eksternal :

1. Terbatasnya anggaran operasional

Anggaran Biro Pemerintahan Umum relatif terbatas jumlahnya sehingga harus dapat mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.

2. Masih lemahnya koordinasi dengan Kab/Kota, Provinsi Jawa Tengah dan DKI di bidang penetapan batas daerah (provinsi, Kab/Kota, Desa dan Kelurahan), Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Trantib, Perlindungan Masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan

c) Permasalahan Pelayanan OPD :

1. Fasilitasi pemerintahan umum belum optimal karena masalah ada perbedaan persepsi dengan kab/kota

2. Laporan-laporan sebagian belum disajikan lengkap karena laporan Kab/Kota Kurang lengkap atau terlambat.

Upaya – upaya pemecahan masalah adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyiapan tenaga fungsional.

2. Meningkatkan koordinasi baik dengan kabupaten/kota maupun dengan provinsi yang berbatasan.

3. Melakukan jemput bola untuk laporan-laporan yang dapat mendukung program/kegiatan Biro Pemerintahan Umum diantaranya laporan perkembangan data penduduk untuk penyajian data kependudukan skala provinsi, maupun laporan lainnya yang berkaitan dengan Trantib, Perlindungan Masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan

[illegible]

RENJA BIRO PEMUM SETDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016



Pada tabel dibawah terdapat review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang menimplementasikan perencanaan anggaran tahunan.

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	9
29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;				28.462.500	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;				50.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Internal Biro Pemerintahan Umum	Jawa Barat	ketersediaan sarana prasarana perkantoran dan aparatur	100%	28.462.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Internal Biro Pemerintahan Umum	Jawa Barat	ketersediaan sarana prasarana perkantoran dan aparatur	100%	50.000.000	
38	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.250.000.000	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.660.000.000	
2	Workshop Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	131.360.000	Workshop Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	175.000.000	
3	Rapat Koordinasi Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	83.156.250	Rapat Koordinasi Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	125.000.000	



4		Monitoring, evaluasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka penataan administrasi Catatan Sipil	Jawa Barat dn Luar Provinsi	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	183.483.750	Monitoring, evaluasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka penataan administrasi Catatan Sipil	Jawa Barat dn Luar Provinsi	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	200.000.000	
5		Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	59.475.000	Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	75.000.000	
6		Sosialisasi Pemanfaatan Data SIK	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	78.900.000	Sosialisasi Pemanfaatan Data SIK	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	100.000.000	
7		Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	110.250.000	Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	125.000.000	
8		Pengadaan Jasa tenaga Teknis Administrator Data Base Kependudukan	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	30.000.000	Pengadaan Jasa tenaga Teknis Administrator Data Base Kependudukan	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	50.000.000	
9		Monitoring, evaluasi dan pengembangan wawasan dalam rangka penataan SIK	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	203.375.000	Monitoring, evaluasi dan pengembangan wawasan dalam rangka penataan SIK	Jawa Barat	Tingkat akurasi pendataan calon pemilih dan penghitungan hasil suara	100%	250.000.000	
10		Rapat Koordinasi Penataan Administrasi Kependudukan	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Akurasi Data kependudukan	89%	86.550.000	Rapat Koordinasi Penataan Administrasi Kependudukan	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Akurasi Data kependudukan	89%	110.000.000	
11		Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	Jawa Barat	Akurasi Data kependudukan	89%	68.500.000	Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	Jawa Barat	Akurasi Data kependudukan	89%	75.000.000	
12		Penyediaan Buku Profil Kependudukan	Jawa Barat	Akurasi Data kependudukan	89%	60.000.000	Penyediaan Buku Profil Kependudukan	Jawa Barat	Akurasi Data kependudukan	89%	175.000.000	



13		Monitoring, evaluasi Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Penataan Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Akurasi Data kependudukan	89%	154.950.000	Monitoring, evaluasi Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Penataan Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Akurasi Data kependudukan	89%	200.000.000	
54		Program Pengadaan Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan				400.000.000	Program Pengadaan Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan				505.000.000	
14		Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	Jawa Barat	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum		140.600.000	Sosialisasi Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	Jawa Barat	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum		175.000.000	
15		Proses Pengadaan, Penataan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Jawa Barat	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum		259.400.000	Proses Pengadaan, Penataan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Jawa Barat	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum		330.000.000	
55		Program Pendidikan Politik Masyarakat				850.000.000	Program Pendidikan Politik Masyarakat				1.175.000.000	
16		Rapat koordinasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	150.000.000	Rapat koordinasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	250.000.000	
17		Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	450.000.000	Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	600.000.000	



18		Rapat Koordinasi Penggantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	75.000.000	Rapat Koordinasi Penggantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	125.000.000	
19		Proses Penggantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	175.000.000	Proses Penggantian Antar Waktu/PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Organisasi/Parpol	100%	200.000.000	
56		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				400.000.000	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				477.500.000	
20		Rapat Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat	Jawa Barat	presentase Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat di Jawa Barat	90%	30.000.000	Rapat Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat	Jawa Barat	presentase Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat di Jawa Barat	90%	35.000.000	
21		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat	Jawa Barat	presentase Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat di Jawa Barat	90%	270.000.000	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat	Jawa Barat	presentase Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat di Jawa Barat	90%	330.000.000	
22		Kegiatan Pengumpulan dan Evaluasi data LINMAS di Jawa Barat	Jawa Barat	Presentase Kualitas Linmas Yang Baik dalam Penyelenggaraan Trantibum dan ketentraman Masyarakat	100%	100.000.000	Kegiatan Pengumpulan dan Evaluasi data LINMAS di Jawa Barat	Jawa Barat	Presentase Kualitas Linmas Yang Baik dalam Penyelenggaraan Trantibum dan ketentraman Masyarakat	100%	112.500.000	
57		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah				850.000.000	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah				1.672.500.000	
23		Rapat Verifikasi Rupabumi Unsur Buatan	Jawa Barat	tingkat ketersediaan data	100%	103.750.000	Rapat Verifikasi Rupabumi Unsur Buatan	Jawa Barat	tingkat ketersediaan data	100%	150.000.000	
24		Rapat Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan	Jawa Barat	tingkat ketersediaan data	100%	103.750.000	Rapat Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan	Jawa Barat	tingkat ketersediaan data	100%	250.000.000	



		Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat	Jawa Barat	tingkat ketersediaan data	100%	92.500.000	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat	Jawa Barat	tingkat ketersediaan data	100%	112.500.000	
26		Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah di Jawa Barat	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	75.000.000	Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah di Jawa Barat	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	125.000.000	
27		Sosialisasi Permendagri Batas Daerah	Jawa Barat	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	75.000.000	Sosialisasi Permendagri Batas Daerah	Jawa Barat	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	250.000.000	
28		Rapat koordinasi dan konsultasi Perapatan Pilar Batas Daerah Antar Provinsi dan kabupaten/kota	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	200.000.000	Rapat koordinasi dan konsultasi Perapatan Pilar Batas Daerah Antar Provinsi dan kabupaten/kota	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	500.000.000	
29		Penyediaan Peta Batas Daerah	Jawa Barat	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	15.000.000	Penyediaan Peta Batas Daerah	Jawa Barat	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	35.000.000	
30		Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penegasan dan Penetapan Batas Daerah di Provinsi	Jawa Barat	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	185.000.000	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penegasan dan Penetapan Batas Daerah di Provinsi	Jawa Barat	Presentase Desa Berkinerja baik	100%	250.000.000	
60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				725.472.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				832.000.000	
31		Penyediaan Makan Minum Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Kegiatan Lingkup Biro Pemerintahan Umum	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	16.780.000	Penyediaan Makan Minum Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Kegiatan Lingkup Biro Pemerintahan Umum	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	25.000.000	



32		Pengadaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi perkantoran	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	184.496.000	Pengadaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi perkantoran	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	250.000.000	
33		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi di Indonesia	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	497.892.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi di Indonesia	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	525.000.000	
34		Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	9.500.000	Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	12.500.000	
35		Penyediaan Jasa sewa Mesin fotocopy	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	12.000.000	Penyediaan Jasa sewa Mesin fotocopy	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	12.000.000	



36		Penyediaan Alat tulis Kantor	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	4.804.000	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jawa Barat	Persentase unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Operasional Dasarnya dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	7.500.000	
69		Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa				1.250.000.000	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa				2.047.500.000	
37		Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jawa Barat	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	38.475.000	Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jawa Barat	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	50.000.000	
38		Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa	Jawa Barat	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	122.200.000	Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa	Jawa Barat	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	250.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	233.300.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	330.000.000	
40		Rapat Kerja dan Ajudikasi Penataan Batas Desa	Jawa Barat	persentasi penegasan batas desa	50%	160.750.000	Rapat Kerja dan Ajudikasi Penataan Batas Desa	Jawa Barat	persentasi penegasan batas desa	50%	175.000.000	
41		Penyediaan Peta Batas Desa	Jawa Barat	persentasi penegasan batas desa	50%	9.250.000	Penyediaan Peta Batas Desa	Jawa Barat	persentasi penegasan batas desa	50%	12.500.000	
		Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Jawa Barat	persentasi penegasan batas desa	50%	30.000.000	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Jawa Barat	persentasi penegasan batas desa	50%	65.000.000	
43		Proses Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jawa Barat	persentasi penyelesaian tanah kas desa	50%	137.345.000	Proses Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jawa Barat	persentasi penyelesaian tanah kas desa	50%	250.000.000	
		Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jawa Barat	persentasi penyelesaian tanah kas desa	50%	62.655.000	Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jawa Barat	persentasi penyelesaian tanah kas desa	50%	125.000.000	



45		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	78.200.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Persentasi Desa yang berkinerja baik	50%	175.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jawa Barat dan Luar Provinsi			214.525.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jawa Barat dan Luar Provinsi			320.000.000	
47		FGD dan Diseminasi Penataan Ruang Wilayah Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	119.400.000	FGD dan Diseminasi Penataan Ruang Wilayah Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	175.000.000	
48		Evaluasi Penataan Ruang Wilayah Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	13.900.000	Evaluasi Penataan Ruang Wilayah Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	45.000.000	
49		Monitoring dan Evaluasi Dalam rangka Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	30.000.000	Monitoring dan Evaluasi Dalam rangka Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	75.000.000	
50		Penyediaan Peta dan Laporan Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	6.625.000	Penyediaan Peta dan Laporan Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa	Jawa Barat	tingkat ketersediaan pranata penataan ruang desa	50%	10.000.000	
			JUMLAH			5.753.934.500		JUMLAH			8.419.500.000	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016, Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tata Pemerintahan, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Ketertarikan Ketertiban, dan Pemerintahan Desa. Beberapa kebijakan nasional yang dijadikan pedoman antara lain :

1. Pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dijabarkan dalam Renstra Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaksanaan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yang dijabarkan dalam Renstra Ditjen Pemerintahan Umum.
3. Pelaksanaan Kegiatan bidang Kesatuan bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dijabarkan dalam rencana strategis Ditjen Otonomi Daerah.
4. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pertanahan berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan



Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005;

Pedoman tersebut bermuara pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Biro Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang pemerintahan umum, membantu Asisten Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pemerintahan umum meliputi aspek tata pemerintahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, serta pemerintahan desa dan kelurahan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum, serta koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pemerintahan umum; dan
 - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pemerintahan umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pemerintahan Umum

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Pemerintahan Umum, terdapat beberapa isu strategis yang akan dihadapi dan perlu mendapat perhatian pada rentang waktu 2014 - 2018 antara lain :



1. Koordinasi pemerintahan umum belum dilaksanakan secara optimal, karena masih lemahnya koordinasi antar Provinsi, Kab/Kota di bidang penetapan batas daerah, batas desa serta penataan ruang desa belum bisa optimal dikarenakan RT, RW dan Kabupaten/Kota kurang disosialisasikan ke Desa/Kelurahan kependudukan, trantib, linmas dan pemerintahan desa.
2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM Aparatur

Tenaga administrasi lebih banyak daripada tenaga teknis dan tenaga teknis yang ada tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga masih banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun keahliannya.

3. Terbatasnya sarana dan anggaran operasional

Dalam memecahkan permasalahan tersebut Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat telah mengantisipasinya dengan menetapkan visi "Menjadi Akselerator Modernisasi Tata Kelola Kepemerintahan di Jawa Barat Tahun 2018". Visi tersebut dijabarkan dalam 2 misi Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik di Jawa Barat
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pelayanan

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Renja Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

a. Maksud

Memberikan pedoman, landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum pada tahun 2015.

b. Tujuan

- 1) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penyelenggaraan pemerintahan umum.
- 2) Mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum



- 3) Optimalnya penggunaan alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum pada Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro Pemerintahan Umu Tahun 2013-2018 yang direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai factor diantaranya adalah guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Barat, pencapaian MDGs serta berbagai factor lainnya.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Biro Pemerintahan Umu pada tahun 2017 terdiri dari 8 program 54 kegiatan dengan lokasi kegiatan tersebar di kabupaten/kota se Jawa Barat. Total Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan ini sebesar Rp. 5.753.934.500,- (Terbilang Lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3.1.
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Umum Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Jawa Barat**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					
								Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1				Urusan Wajib											
1				Pelayanan Dasar											
1	5			Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
1	5	23		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat											
			01	Kegiatan Rapat Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Kab/Kota Se Jawa Barat	rekomen-dasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	100%	Dokumen Hasil Rapat Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat	3 Dokumen	30.000.000	40.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			02	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Kab/Kota Se Jawa Barat	rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	100%	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat	1 Kegiatan	270.000.000	300.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			03	Kegiatan Pengumpulan dan evaluasi data LINMAS di Jawa Barat	Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Kab/Kota Se Jawa Barat	Jumlah rekomendasi permasalahan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	100%	Dokumen Hasil evaluasi data LINMAS di Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	110.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
1	5	24		Program Pendidikan Politik Masyarakat											
			01	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/partai politik	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Fasilitas Keanggotaan DPRD Prov dan Kab/Kota, Kepala Daerah dan Pejabat Negara di Kabupaten/Kota	95%	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Dokumen	150.000.000	200.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			02	Kegiatan Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/partai politik	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Fasilitas Keanggotaan DPRD Prov dan Kab/Kota, Kepala Daerah dan Pejabat Negara di Kabupaten/Kota	95%	Penetapan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Kegiatan	450.000.000	500.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			03	Kegiatan Rapat Koordinasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/partai politik	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Fasilitas Keanggotaan DPRD Prov dan Kab/Kota, Kepala Daerah dan Pejabat Negara di Kabupaten/Kota	95%	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	6 Dokumen	75.000.000	85.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			04	Kegiatan Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi/partai politik	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Presentase Fasilitas Keanggotaan DPRD Prov dan Kab/Kota, Kepala Daerah dan Pejabat Negara di Kabupaten/Kota	95%	Penetapan Keputusan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	1 Kegiatan	175.000.000	200.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
2				Non Pelayanan Dasar											
2	4			Bidang Pertanahan											
2	4	38		Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan											
2	4	38	01	Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kab/Kota Se Jawa Barat	Rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100%	Dokumen Hasil Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	2 Dokumen	140.600.000	160.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			02	Kegiatan Proses Pengadaan, Penataan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kab/Kota Se Jawa Barat	Rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100%	Jumlah data rekomendasi fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum usulan kab/kota berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagai bahan kebijakan	1 Kegiatan	259.400.000	275.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
2	6			Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2	6	43		Program Penataan Administrasi Kependudukan											
			01	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan	1 dokumen	59.475.000	65.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			02	Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data SIK	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Kab/Kota Se Jawa Barat	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Dokumen Hasil Sosialisasi Pemanfaatan Data SIK	1 dokumen	39.450.000	45.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			03	Kegiatan Bimtek Pengembangan SDM Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Kab/Kota Se Jawa Barat	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Dokumen Hasil Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	4 dokumen	110.250.000	130.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			04	Pengadaan Jasa Teknis Administrasi Database Kependudukan	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Kota Bandung	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Tenaga Teknis Administrator Database Kependudukan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka Penataan SIAK	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka Penataan SIAK	1 Kegiatan	203.375.000	250.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			06	Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Penataan Administrasi Kependudukan	2 dokumen	86.550.000	160.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			07	Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Dokumen Hasil Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	1 dokumen	85.000.000	100.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			08	Kegiatan Penyediaan Buku Profil Kependudukan	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Kab/Kota Se Jawa Barat	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Buku Profil Kependudukan	150 buku	60.000.000	90.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			09	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka Penataan Adm Kependudukan	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Prosentase Akurasi Data Kependudukan	98%	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka Penataan Adm Kependudukan	1 Kegiatan	177.900.000	185.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



*Draft Rencana Kerja Biro Pemerintahan Umum
Tahun 2017*

			011	Kegiatan Workshop Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Kab/Kota Se Jawa Barat	Terlaksananya penataan administrasi Pencatatan Sipil di Jawa Barat	95%	Dokumen Workshop Kelahiran Tahun	Hasil Akta 0-18	4 dokumen	131.360.000	135.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			012	Kegiatan Rapat Koordinasi Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Terlaksananya penataan administrasi Pencatatan Sipil di Jawa Barat	95%	Dokumen Rapat Koordinasi Cakupan Akta Kelahiran Tahun	Hasil Koordinasi Akta 0-18	2 dokumen	83.156.250	85.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			013	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka Penataan Adm Kependudukan	Peningkatan Manajemen Kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Terlaksananya penataan administrasi Pencatatan Sipil di Jawa Barat	95%	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan dalam rangka Penataan Adm Kependudukan	Hasil Evaluasi dan Pengembangan dalam Penataan Adm Kependudukan	1 kegiatan	183.483.750	200.850.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
2	7			Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
2	7	45		Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa												
			01	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Hasil Koordinasi dan Konsultasi	3 Dokumen	78.200.000	150.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			02	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	214.525.000	300.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			03	Kegiatan Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Dokumen Hasil Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2 Dokumen	38.475.000	150.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			04	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa		Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Dokumen Hasil Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	122.200.000	150.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Wawasan Dalam Rangka Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	233.300.000	250.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			06	Kegiatan Rapat dan ajudikasi Penataan Batas Desa		Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	1 Kabupaten	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Dokumen Hasil Rapat Kerja dan ajudikasi Penataan Batas Desa	2 Dokumen	160.750.000	300.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			07	Penyediaan Peta Batas Desa		Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	1 Kabupaten	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Peta Batas Desa	1 Unit	9.250.000	20.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



*Draft Rencana Kerja Biro Pemerintahan Umum
Tahun 2017*

			08	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Jawa Barat		Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur desa	Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase aparatur desa yang berkinerja baik	62%	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Jawa Barat	1 Kegiatan	30.000.000	75.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			09	Kegiatan Proses Penyelesaian Tanah Kas Desa		Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pemerintahan desa	Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase Penyelesaian Kas Desa	80%	Dokumen Hasil Proses Penyelesaian Tanah Kas Desa	1 Kegiatan	137.345.000	150.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			010	Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kas Desa		Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pemerintahan desa	Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase Penyelesaian Kas Desa	80%	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	2 Dokumen	62.655.000	100.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
2	7	47		Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan											
			01	Kegiatan FGD dan Diseminasi Penataan Ruang Wilayah Desa		Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pemerintahan desa	1 Kabupaten	Persentase desa yang berkinerja baik	90%	Dokumen Hasil FGD dan Diseminasi Penataan Ruang Wilayah Desa	2 Dokumen	119.400.000	150.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			02	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi		Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pemerintahan desa	1 Kabupaten	Persentase desa yang berkinerja baik	90%	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi	1 Kegiatan	37.275.000	200.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			03	Penyediaan Peta dan Laporan Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa		Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme pemerintahan desa	1 Kabupaten	Persentase desa yang berkinerja baik	90%	Peta dan Laporan Penataan Ruang Wilayah Desa Berdasarkan Tipologi Desa	2 Paket	6.625.000	10.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
3				Penunjang Urusan Pemerintahan											
3	1			Bidang Perencanaan											
3	1	97		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah											Biro Pemerintahan Umum
			01	Kegiatan Rapat Verifikasi Rupabumi Unsur Buatan	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab/Kota Se Jawa Barat	Tertib administrasi dalam penamaan unsur rupa bumi di Jawa Barat	90%	Dokumen Hasil Rapat Verifikasi Rupabumi Unsur Buatan	4 dokumen	103.750.000	120.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			02	Kegiatan Rapat Inventarisasi Rupabumi Unsur buatan	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab/Kota Se Jawa Barat	Tertib administrasi dalam penamaan unsur rupa bumi di Jawa Barat	90%	Dokumen Hasil Rapat Inventarisasi Rupabumi Unsur buatan	4 dokumen	103.750.000	120.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab/Kota Se Jawa Barat	Tertib administrasi dalam penamaan unsur rupa bumi di Jawa Barat	90%	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat	1 Kegiatan	92.500.000	110.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			04	Kegiatan Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Di Jawa Barat		Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapannya	66 Segmen	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Di Jawa Barat	5 Dokumen	75.000.000	100.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			05	Kegiatan Sosialisasi Permendagri Batas Daerah		Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab/Kota Se Jawa Barat	Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapannya	66 Segmen	Dokumen Hasil Sosialisasi Permendagri Batas Daerah	5 Dokumen	75.000.000	100.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			06	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perapatan Pilar Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota		Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jawa Barat dan DKI Jakarta	Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapannya	66 Segmen	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perapatan Pilar Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	200.000.000	250.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			07	Kegiatan Penyediaan Peta Batas Daerah		Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab/Kota Se Jawa Barat	Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapannya	66 Segmen	Peta Batas Daerah	10 Unit	15.000.000	25.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			08	Kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam rangka Penegasan dan Penetapan Batas Daerah di Provinsi		Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab/Kota Se Jawa Barat	Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapannya	66 Segmen	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi dalam rangka Penegasan dan Penetapan Batas Daerah di Provinsi	1 Kegiatan	185.000.000	225.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
3	2			Bidang Keuangan											



3	2	101		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
			01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Internal Biro Pemerintahan Umum			Kab/Kota Se Jawa Barat	tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi	100%	tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi	8 dok	28.462.500	31.308.750	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
3	5			Fungsi Lain											
3	5	111		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
			01	Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat Kodnsolidasi dan Koordinasi Kegiatan Lingkup Biro Pemerintahan Umum			Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	16.780.000	20.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			02	Kegiatan Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran			Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	184.496.000	200.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			03	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Jawa Barat dan seluruh Provinsi di Indonesia	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	497.892.000	600.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			04	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	9.500.000	11.500.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum



			05	Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Mesin Fotocopy			Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	12.000.000	12.000.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
			06	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab/Kota Se Jawa Barat	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	4.804.000	5.500.000	Lanjutan	Biro Pemerintahan Umum
JUMLAH												5.753.934.500	6.452.158.750		



BAB IV PENUTUP

Renja Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil, tata pemerintahan, pemerintahan desa dan kelurahan serta kesatuan bangsa politik, perlindungan masyarakat dan ketentraman ketertiban serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui program pembangunan yang di bidang pemerintahan umum.

Renja yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi dapat tumbuh dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renja ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Biro Pemerintahan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bandung, Agustus 2016

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM,

Dr. H. ABAS BASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580405 198003 1 003